



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANNA SRI UNTARI Binti SURYO SUDHARSONO (Alm), Tempat/ tgl.Lahir : Surabaya, 26 Juni 1958, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **EDI SARWONO, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat dari Kantor Hukum EDI SARWONO, S.H., M.H., & REKAN, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, email : *edi.sarwonoshmh@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 12 Maret 2025 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Clp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama : **ABDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF** pada tanggal 29 Januari 1986 di KUA Cilacap Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama : **Tasya Tiddy Hapsari**, jenis kelamin : Perempuan, Tempat/tgl.lahir : Cilacap, 31 Juli 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 7 Desember 2016 berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2950/Pdt.G/2016/PA.Clp;
3. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama **ABDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF** telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak yang bernama **Tasya Tiddy Hapsari** dari Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap sejak bulan Februari 2009 dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya, namun setidaknya – setidaknya masih dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
4. Bahwa Pemohon dan mantan suami pemohon mempunyai harta bersama berupa :
 - a. sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari;
 - b. sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari;
5. Bahwa Pemohon hendak bermaksud mengajukan Permohonan Tidak Hadir (Afwezigheid) terhadap **ABDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF** untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari;
6. Bahwa tujuan daripada penjualan sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari tersebut guna mencukupi biaya kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tidak diketahuinya secara pasti keberadaan **ABDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF**, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan tidak hadir (*Afwezigheid*) agar dapat melakukan Perbuatan Hukum, serta menjual satu bidang tanah dan satu bidang tanah beserta bangunan seperti yang telah disebutkan dalam Posita 4 diatas;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam posita 4 diatas, karena ketidaktahuan atas keberadaan **ABDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF** sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan mengakibatkan ketidakpastian hukum atas harta bersama yang merupakan bagian dari Pemohon juga;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1A berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **ABDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF** adalah sebagai orang yang tidak hadir (*Afwezigheid*);
3. Memberi ijin kepada pemohon melakukan perbuatan Hukum guna menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Kuasa Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dali Permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Clp



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Anna Sri Untari NIK : 3301226606580003, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.1;**
2. Fotokopi Surat pernyataan sama nama tertanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2794/PKL/1992 atas nama Tasya Tiddi Hapsari, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.3;**
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2950/Pdt.G/2016/PA.Clp, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301220104160003 atas nama Kepala Keluarga Anna Sri Untari, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Moyang Nomor : 474.2/78/II/2025, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan orang hilang Nomor : STPLKO/07/III/2025/Sek Clp Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.7;**
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1349 atas nama Anna Sri Untari, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.8;**
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2319 atas nama Maria Anna Sri Untari, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P.9;**

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya, serta bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang sebagai Saksi, yang telah memberikan keterangannya secara dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fransisca Susi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon dulu bernama Abdi Saputra;
- Bahwa waktu Pemohon menikah dengan Abdi Saputra, punya 1 (satu) anak perempuan, namanya Tasya Tiddi Hapsari;
- Bahwa mantan suami Pemohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2009 sebelum mereka bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2016;



- Bahwa sewaktu Pemohon masih suami istri dengan Abdi Saputra, punya harta bersama yaitu sebidang tanah di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dan sebidang tanah beserta bangunan di Jl. Batu AC 13 No 11 GSP RT 005 RW 014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Pemohon selaku yang berhak atas sebagian harta bersama tersebut hendak menjualnya untuk mencukupi biaya kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa Abdi Saputra sejak tahun 2009 sampai sekarang kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari informasi keberadaan mantan suaminya tersebut namun sampai sekarang tidak ketemu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan menetapkan bahwa mantan suami Pemohon yaitu Abdi Saputra sebagai orang yang tidak hadir untuk persyaratan menjual harta bersama tersebut;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan bagian hak atas harta bersama tersebut kepada mantan suaminya, jika dikemudian hari ternyata mantan suami Pemohon tersebut datang menemui Pemohon dan meminta haknya;

2. Saksi Sri Hartati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon dulu bernama Abdi Saputra;
- Bahwa waktu Pemohon menikah dengan Abdi Saputra, punya 1 (satu) anak perempuan, namanya Tasya Tiddi Hapsari;
- Bahwa mantan suami Pemohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2009 sebelum mereka bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2016;
- Bahwa sewaktu Pemohon masih suami istri dengan Abdi Saputra, punya harta bersama yaitu sebidang tanah di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dan sebidang tanah beserta bangunan di Jl. Batu AC 13 No 11 GSP RT 005 RW 014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku yang berhak atas sebagian harta bersama tersebut hendak menjualnya untuk mencukupi biaya kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari Pemohon;
 - Bahwa Abdi Saputra sejak tahun 2009 sampai sekarang kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari informasi keberadaan mantan suaminya tersebut namun sampai sekarang tidak ketemu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan menetapkan bahwa mantan suami Pemohon yaitu Abdi Saputra sebagai orang yang tidak hadir untuk persyaratan menjual harta bersama tersebut;
 - Bahwa Pemohon bersedia memberikan bagian hak atas harta bersama tersebut kepada mantan suaminya, jika dikemudian hari ternyata mantan suami Pemohon tersebut datang menemui Pemohon dan meminta haknya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.9** dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan oleh Kuasa Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf pada tanggal 29 Januari 1986 di KUA Cilacap Selatan dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Tasya Tiddy Hapsari, lahir di Cilacap, 31 Juli 1992;
- Bahwa benar Pemohon dengan Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf telah bercerai pada tanggal 7 Desember 2016 berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2950/Pdt.G/2016/PA.Clp;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mantan suami Pemohon tersebut telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya yang bernama Tasya Tiddy Hapsari dari tempat tinggal yang beralamat di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap sejak bulan Februari 2009 dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa benar Pemohon dan mantan suaminya punya harta bersama berupa :
 - a. sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari;
 - b. sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari;
- Bahwa benar Pemohon selaku yang berhak atas sebagian harta tersebut menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari guna mencukupi biaya kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa benar oleh karena mantan suami Pemohon yang bernama Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf tersebut sejak bulan Februari 2009 sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 16 (enam belas) tahun tidak diketahui dimana keberadaannya, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan menetapkan bahwa Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf sebagai orang yang tidak hadir (**Afwezigheid**) dengan maksud untuk persyaratan menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari tersebut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan memberikan bagian hak dari Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf, jika dikemudian hari ternyata Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf menemui Pemohon dan meminta haknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 huruf j menyatakan bahwa Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW) harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, dalam Permohonan ini berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti **P-5**, berupa Kartu Keluarga milik Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena berdasarkan bukti **P-4** berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2950/Pdt.G/PA.Clp, Pemohon adalah mantan istri dari Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf, berdasarkan bukti **P-6** berupa fotokopi Surat Keterangan Moyang Nomor : 474.2/78/II/2025 dan bukti **P-7** berupa Surat Keterangan orang hilang Nomor : STPLKO/07/III/2025/Sek Clp Selatan dinyatakan bahwa Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf tidak diketahui lagi keberadaanya sejak bulan Februari 2009, sehingga Pemohon adalah pihak / orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dimana Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, terhadap petitum tersebut oleh karena berkaitan dengan petitum ke-2 dan ke-3, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menetapkan bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf yang kini tidak diketahui

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Clp



keberadaannya adalah sebagai orang yang tidak hadir (*Afwezigheid*), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUHPdt, "*bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya*";

Menimbang, bahwa Keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) yang diatur dalam Pasal 463 BW terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Meninggalkan tempat kediamannya;
2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur;
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut;
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf yang dulunya pernah menikah dengan Pemohon dan telah bercerai, sejak bulan Februari 2009 hingga saat ini sudah selama 16 (enam belas) tahun Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf tersebut tidak diketahui keberadaannya, Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf namun tidak membuahkan hasil, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Moyang Nomor : 474.2/78/II/2025 (bukti **P-6**) dan Surat Keterangan orang hilang Nomor : STPLKO/07/III/2025/Sek Clp Selatan (bukti **P-7**) diketahui bahwa benar Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Februari 2009 hingga saat ini, dengan demikian Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf telah pergi kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan tidak pula menunjuk seseorang untuk mewakilinya sebagai Kuasa untuk mengurus kepentingannya, maka berdasarkan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa mantan Suami Pemohon yang bernama Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf tersebut tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Februari tahun 2009 dan dinyatakan sebagai orang yang tidak hadir (*afwezigheid*), oleh karenanya petitum ke-2 dari permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan Hukum guna menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 119 KUH Perdata mengatur bahwa pada prinsipnya perkawinan menimbulkan harta bersama (*gemeenschap van goederen*), kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf pada tanggal 29 Januari 1986 di KUA Cilacap Selatan dan selama perkawinan tersebut terdapat harta bersama berupa : sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari (bukti **P-8**) dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari (bukti **P-9**);

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2009 Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf yang saat itu statusnya masih suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon (bukti **P-6** dan **P-7**) dan kemudian berdasarkan Salinan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2950/Pdt.G/PA.Clp (bukti **P-4**)

Pemohon dengan suaminya telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama antara Pemohon dengan mantan suaminya tersebut di atas, Pemohon selaku yang berhak atas sebagian harta bersama tersebut bermaksud akan menjualnya guna mencukupi biaya kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum ke-2 di atas, mantan suami Pemohon yaitu Abdi Saputra Bin Muhammad Yusuf telah dinyatakan sebagai orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) maka dalam hal terdapat harta bersama yang membutuhkan tindakan hukum demi kepentingan yang mendesak dan bermanfaat, maka pihak yang hadir dapat mengajukan permohonan izin kepada pengadilan untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjual harta bersama berupa : sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari adalah beralasan secara hukum dan patut dikabulkan, karena perbuatan hukum yang dimohonkan ditujukan untuk kepentingan mendesak, bersifat adil, dan Pemohon telah menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan hak mantan suaminya jika muncul di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, dan ke-3 dikabulkan, maka petitum ke-4 permohonan Pemohon yang memohon agar beban biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga harus dikabulkan, sehingga biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Pengadilan Buku II, KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **ABDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YUSUF** adalah sebagai orang yang tidak hadir (*Afwezigheid*);
3. Memberi ijin kepada pemohon melakukan perbuatan Hukum guna menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Jawa Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1349 seluas 340 m² atas nama Anna Sri Untari dan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Batu AC 13 No.11 GSP RT.005 RW.014 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2319 seluas 147 m² atas nama Maria Anna Sri Untari;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh kami Rahmat Aries, SB, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.P/2025/PN.Clp tanggal 12 Maret 2025, Penetapan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Suyanto, S.H.

Rahmat Aries, SB, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00;
3. PNBP panggilan : Rp 10.000,00;
4. Sumpah : Rp 50.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);